



# PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI NUSA TENGGARA TIMUR 1988 - 1995



**BPS** PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<https://ntt.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI .....		i
BAB I.	PENDUDUK .....	1
	1.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	1
	1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk .....	2
	1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk di setiap Kabupaten .....	3
	1.4. Tingkat Kelahiran .....	4
	1.5. Tingkat Kematian .....	5
BAB II.	PENDIDIKAN .....	7
	2.1. Tingkat Buta Huruf .....	8
	2.2. Tingkat Pendidikan Penduduk .....	11
BAB III.	KESEHATAN .....	12
	3.1. Perkembangan Fasilitas Kesehatan .....	12
	3.2. Status Gizi Balita .....	14
BAB IV.	KETENAGAKERJAAN .....	15
	4.1. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	15
	4.2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan .....	16
BAB V.	PENDAPATAN REGIONAL .....	18
	5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku .....	18
	5.2. Pendapatan Perkapita Penduduk .....	21
	5.3. Pertumbuhan Ekonomi .....	23
	5.4. Pertumbuhan Ekonomi di Setiap Kabupaten .....	25
BAB VI.	PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI PENDUDUK .....	28
	6.1. Pola Pengeluaran Penduduk .....	28
	6.2. Tingkat Ketidakmerataan Pendapatan .....	29
BAB VII.	PRODUKSI PANGAN .....	31
	7.1. Luas Panen Tanaman Pangan .....	31
	7.2. Rata-rata Produksi per Hektar .....	32
	7.3. Produksi Pangan .....	33
	7.4. Penyediaan Pangan .....	34
BAB VIII.	SENSUS PERTANIAN 1993 (ST'93) .....	37
BAB IX.	HASIL STUDI IDENTIFIKASI DESA MISKIN .....	39

**BAB I**  
**PENDUDUK**

**1.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.**

Kebijaksanaan pembangunan di bidang kependudukan diarahkan untuk menekan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Untuk menekan pertumbuhan penduduk telah dilaksanakan program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk menekan tingkat kelahiran dan melalui program transmigrasi ke propinsi lain yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi penduduk. Meningkatkan kualitas hidup penduduk berarti meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala bidang, baik sosial maupun ekonomi.

Tabel 1.1. Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km<sup>2</sup>  
di Nusa Tenggara Timur; 1988, 1990 & 1995

Kabupaten	Penduduk			Kepadatan per km <sup>2</sup>		
	1988 <sup>1)</sup>	1990 <sup>2)</sup>	1995 <sup>3)</sup>	1988	1990	1995
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.Sumba Barat	274 705	291 921	323 562	68	72	80
02.Sumba Timur	141 979	152 946	166 766	20	22	24
03.Kupang	486 872	522 944	585 856	66	71	80
04.T T S	331 175	348 067	377 036	84	88	96
05.T T U	157 532	163 052	177 515	59	61	66
06.B e l u	204 952	216 060	233 522	84	88	95
07.A l o r	137 521	144 629	152 880	48	50	53
08.Flores Timur	272 750	265 759	269 130	89	86	87
09.S i k k a	243 182	246 867	259 554	140	142	150
10.E n d e	216 428	218 841	226 334	106	107	111
11.N g a d a	191 118	198 100	211 266	63	65	70
12.Manggarai	469 606	499 458	551 352	66	70	77
Jumlah	3 127 820	3 268 644	3 534 763	66	69	75

Sumber : 1) Hasil Registrasi Penduduk 1988  
2) Sensus Penduduk 1990  
3) SUSENAS 1995

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 1990 (Sensus Penduduk 1990) sebanyak 3 268 644 orang yang mendiami wilayah (daratan) seluas 47 349,9 km<sup>2</sup>. Pada tahun 1988 jumlah penduduk sebanyak 3 127 820 orang dan pada tahun 1995 berjumlah 3 534 763 orang. Kepadatan penduduk per kilometer persegi di NTT sebesar 66,0 pada tahun 1988, meningkat menjadi 69,0 pada tahun 1990, dan meningkat lagi pada tahun 1995 menjadi 75 orang. Dilihat dari kepadatan penduduk tampaknya NTT belum mengalami masalah kependudukan yang serius. Namun kalau dilihat dari kondisi tanah yang tersedia dimana 70 persen dari seluruh luas lahan adalah tanah kering yang tidak berpengairan, maka daerah ini menghadapi tantangan yang cukup serius dalam upaya menyediakan tanah pertanian yang layak bagi penduduknya. Oleh karena itu program pembangunan untuk menekan penduduk perlu terus ditingkatkan terutama melalui program Keluarga Berencana.

### 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1961 sampai 1990 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Antar Sensus  
Periode 1961 - 1990 ( persen )

Kabupaten	1961-1971	1971-1980	1980-1990
(1)	(2)	(3)	(4)
01.Sumba Barat	1,87	2,36	2,32
02.Sumba Timur	0,88	1,92	2,20
03.K u p a n g	1,65	2,75	2,64
04.Timor T.Selatan	1,74	2,05	1,85
05.Timor T.Utara	1,45	1,48	1,97
06.B e l u	1,64	1,86	1,78
07.A l o r	0,21	0,97	1,47
08.Flores Timur	1,71	1,27	0,31
09.S i k k a	1,20	1,60	1,17
10.E n d e	0,97	1,30	0,82
11.N g a d a	0,67	2,03	1,39
12.Manggarai	2,39	2,39	2,31
N T T	1,57	1,95	1,79
Indonesia	2,10	2,37	1,98

Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 1961-1990 menunjukkan adanya fluktuasi. Selama kurun waktu tahun 1961-1971, laju pertumbuhan penduduk di daerah ini menunjukkan angka yang rendah yaitu rata-rata sebesar 1,57 persen per tahun. Kemudian pada kurun waktu 1971-1980, laju pertumbuhan menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1,95 persen. Selanjutnya pada kurun waktu 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk menjadi lebih lambat lagi yaitu sebesar 1,79 persen per tahun dan pertumbuhan ini masih berlangsung hingga tahun 1995.

Dibandingkan dengan keadaan Nasional, laju pertumbuhan penduduk NTT selalu lebih rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat kematian penduduk NTT relatif masih lebih tinggi dibanding tingkat kematian penduduk secara Nasional.

Selanjutnya menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk pada periode 1980-1990 disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran dan migrasi. Penurunan tingkat kelahiran tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan program KB yang di NTT dimulai pada awal tahun 1979.

### 1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Setiap Kabupaten.

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk antar kabupaten dalam kurun waktu 1980-1990 tidak sama, ada yang masih tinggi (di atas pertumbuhan rata-rata NTT sebesar 1,79 persen), dan ada yang rendah. Kabupaten Sumba Barat (2,32 persen), Sumba Timur (2,20 persen), Kupang (2,64 persen), Timor Tengah Selatan (1,85 persen), Timor Tengah Utara (1,97 persen), dan Manggarai (2,31 persen) merupakan kabupaten-kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran penduduk dan rendahnya tingkat kematian. Kabupaten Kupang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi (2,64 persen) yang disebabkan oleh banyaknya penduduk yang masuk dari daerah lain karena alasan bekerja, sekolah dan sebagainya.

Beberapa kabupaten seperti Alor (1,47 persen), Flores Timur (0,31 persen), Sikka (1,17 persen), Ende (0,82 persen) dan Ngada (1,39 persen) yang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, tampaknya disebabkan oleh masih tingginya tingkat

kematian penduduk dan banyaknya penduduk yang beremigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten Flores Timur merupakan yang terendah. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk dari kabupaten ini yang merantau (emigrasi) terutama laki-laki dewasa, sehingga tingkat kelahiran menjadi rendah.

#### 1.4. Tingkat Kelahiran.

Tingkat kelahiran dapat ditunjukkan dengan suatu ukuran yang disebut TFR (Total Fertility Rate), yang menyatakan rata-rata banyaknya anak dari wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).

Dalam dua dasa warsa terakhir ini tingkat kelahiran penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) cenderung menurun. Pada periode 1967-1970 besarnya tingkat kelahiran total (TFR) di NTT adalah 5,96, kemudian menurun pada periode 1976-1979 menjadi 5,54 dan menurun lagi pada periode 1986-1989 menjadi 4,61 dan periode 1991-1993 menjadi 3,87.

Tabel 1.3. ASFR dan TFR Penduduk Nusa Tenggara Timur  
1967 - 1993

Periode	Age Specific Fertility Rate (ASFR)							TFR
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1967-1970	72	241	292	267	189	94	37	5,96
1976-1979	45	214	281	259	182	95	32	5,54
1986-1989	43	194	241	210	143	69	22	4,61
1991-1993	29	159	210	191	124	39	23	3,87

Sumber : Sensus, SUSENAS & SDKI '94

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat kelahiran pada kelompok umur di bawah 20 tahun sangat rendah, yaitu sebesar 29 kelahiran hidup setiap 1000 wanita pada periode 1991-1993. Gambaran lain yang tampak adalah bahwa penurunan tingkat kelahiran tersebut

tidak hanya terjadi secara total (TFR), tetapi juga pada setiap kelompok umur wanita. Namun demikian angka ini masih perlu diturunkan bila ingin menyamai tingkat kelahiran secara Nasional.

### 1.5. Tingkat Kematian.

Tingkat kematian penduduk merupakan salah satu indikator yang penting dari kesejahteraan penduduk. Penurunan tingkat kematian penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan program kesehatan tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan program pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi maupun sosial.

Tingkat kematian penduduk secara ringkas diukur dari Tingkat Kematian Bayi (Infant Mortality Rate = IMR). Hal ini disebabkan karena data banyaknya penduduk yang meninggal pada setiap periode tidak tersedia, yang seyogianya tercatat dalam kegiatan registrasi penduduk.

Tabel 1.4. Perkiraan Tingkat Kematian Bayi (IMR)  
di Nusa Tenggara Timur, 1967 - 1993

D a e r a h	Hasil SP 1971 (1967)	Hasil SP 1980 (1976)	Hasil SP 1990 (1986)	SDKI '94 (1993)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)	120	61	52	....
Pedesaan (P)	153	128	82	....
K + P	151	127	77	71

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam dua dasa wara terakhir telah terjadi penurunan tingkat kematian bayi (IMR) yang cukup tajam. Jika pada akhir tahun 1960-an besarnya IMR masih 151 bayi per 1000 kelahiran hidup, sembilan tahun kemudian angka tersebut turun menjadi 127 bayi per 1000 kelahiran hidup dan pada akhir 1980-an turun lagi menjadi 77 bayi per 1000 kelahiran dan pada tahun 1993, IMR ini telah menurun menjadi 71 bayi per 1000 kelahiran. Ini berarti selama kurang lebih 26 tahun telah terjadi penurunan sebesar 53 persen, atau rata-rata turun sebesar 2,8

persen per tahun. Laju penurunan IMR di daerah perkotaan (4,3 persen per tahun) ternyata lebih cepat dibandingkan di daerah pedesaan (3,2 persen per tahun). Hal ini dimungkinkan karena fasilitas kesehatan di daerah perkotaan relatif lebih banyak tersedia dan lebih mudah dijangkau, sementara fasilitas kesehatan di daerah pedesaan relatif terbatas dan agak sukar dijangkau masyarakat karena tempat tinggal mereka yang menyebar.

<https://ntt.bps.go.id>

## BAB II PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Titik berat pembangunan pendidikan di NTT diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama.

Kemajuan bidang pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya sarana dan prasarana yang tersedia serta faktor kemampuan masyarakat terutama ditinjau dari keadaan perekonomiannya. Kemajuan demi kemajuan di bidang pendidikan di NTT terus dicapai dalam berbagai tahap PELITA. Hal ini tampak dari berbagai

Tabel 2. Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di NTT  
Tahun 1992 - 1995

Perincian	1992	1993	1994	1995
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. S D				
a. Sekolah	3 946	3 980	3 921	4 030
b. Guru	28 109	29 464	26 508	27 283
c. Murid	583 644	583 349	578 937	604 555
02. SMTP				
a. Sekolah	551	556	530	563
b. Guru	7 464	7 602	7 528	7 503
c. Murid	99 088	105 687	112 079	121 531
03. SLTA				
a. Sekolah	226	224	196	230
b. Guru	5 140	5 153	4 860	5 576
c. Murid	53 955	57 778	57 223	65 208

Keterangan : Pendidikan yang dikelola oleh Depdikbud dan di luar Depdikbud

Sumber : Statistik Pendidikan, KS. Prop. NTT

hasil survei dan sensus. Persentase penduduk yang buta huruf menurun terus dari tahun ke tahun, walaupun masih di atas angka persentase Nasional. Selain itu persentase penduduk yang tidak/belum menamatkan jenjang pendidikan SD cenderung menurun.

Kemajuan-kemajuan tersebut tidak terlepas dari peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang diusahakan pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 1980 di NTT baru terdapat 2 659 buah SD, 326 buah SMTP, dan 123 buah SMTA. Sepuluh tahun kemudian, yaitu tahun 1990 terdapat 3 919 buah SD, 533 buah SMTP, dan 215 buah SMTA. Kemudian pada tahun 1995 meningkat lagi menjadi 4 030 buah SD, 563 buah SMTP dan 230 buah SMTA. Dengan demikian telah terjadi pertumbuhan jumlah sekolah rata-rata per tahun sejak tahun 1980-1995 sebesar 2,81 persen untuk tingkat SD, 3,71 persen untuk tingkat SMTP, dan 4,76 persen untuk tingkat SMTA. Selain itu jumlah gurupun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah sekolah. Pada tahun 1980 terdapat 18 672 orang guru SD, 4 196 orang guru SMTP, dan 2 265 orang guru SMTA. Kemudian pada tahun 1995, jumlah guru SD menjadi 27 283 orang (tumbuh rata-rata per tahun sebesar 2,96 persen), jumlah guru SMTP menjadi 7 503 orang (rata-rata pertumbuhannya 4,57 persen per tahun), dan jumlah guru SMTA menjadi 5 576 orang (rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,18 persen per tahun).

### 2.1. Tingkat Buta Huruf.

Dalam kegiatan Sensus Penduduk seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis jika ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Dengan demikian mereka yang tidak dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf dikategorikan sebagai orang yang buta huruf.

Pada tahun 1980 penduduk Nusa Tenggara Timur yang berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf mencapai 674 572 orang (34,9 persen), kemudian pada tahun 1987 menurun menjadi 551 813 orang (24,4 persen), dan pada tahun 1994 menurun lagi menjadi 445 585 orang (17,4 persen). Usaha pemerintah dalam pemberantasan buta huruf untuk penduduk usia muda melalui program Wajib

Belajar menunjukkan hasil yang nyata, seperti tampak pada Tabel 2.1. Penurunan persentase penduduk yang buta huruf pada kelompok umur 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan 20-24 tahun jauh lebih cepat dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya. Penurunan persentase penduduk yang buta huruf pada kelompok umur 45-49 tahun dan 50 tahun ke atas, tidak secepat penurunan pada kelompok umur di bawahnya, namun demikian penurunan ini mempunyai arti tersendiri. Dalam hal ini program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program Kelompok Belajar Paket A telah menunjukkan hasilnya. Namun demikian secara keseluruhan persentase penduduk yang buta huruf di NTT selalu lebih tinggi dibandingkan angka Nasional. Persentase penduduk Indonesia yang buta huruf pada tahun 1980 sebesar 28,9 persen, kemudian menjadi 15,9 persen pada tahun 1990.

Tabel 2.1. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Umur 1980, 1987, 1990, 1993 dan 1994

Kelompok Umur	1980 1)		1987 2)		1990 1)		1993 2)		1994 2)	
	Banyaknya	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10-14	59 189	17,9	21 142	5,3	22 787	5,7	22 731	5,0	26 986	6,0
15-19	40 870	14,1	22 366	7,5	15 509	4,6	13 851	4,1	13 599	3,9
20-24	44 775	18,9	32 090	11,9	24 980	9,2	15 901	5,9	14 472	5,3
25-29	46 194	23,6	33 317	13,6	34 924	13,6	24 443	9,8	19 545	7,6
30-34	52 798	33,7	34 543	17,9	39 307	17,6	28 002	12,2	29 783	12,5
35-39	62 791	40,4	43 607	25,6	37 768	21,7	33 272	16,0	35 165	15,8
40-44	63 132	49,5	46 078	33,2	46 149	31,8	33 203	20,2	38 750	23,2
45-49	68 053	58,9	63 611	44,2	51 351	38,0	44 656	30,5	40 703	27,5
50 +	236 770	73,5	254 788	63,5	240 857	58,8	239 744	52,5	226 457	50,8
TT	-	-	271	-	-	-	163	-	125	-
Jumlah	674 572	34,9	551 813	24,4	513 632	21,9	455 966	18,1	445 585	17,4

Keterangan : 1) Sensus  
2) SUSENAS

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa penurunan persentase penduduk yang buta huruf untuk kurun waktu 1990-1994 terjadi di daerah

pedesaan dan di daerah perkotaan. Namun demikian persentase penduduk yang buta huruf di daerah pedesaan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase di daerah perkotaan. Persentase penduduk buta huruf di daerah perkotaan pada tahun 1990 sebesar 5,1 persen dan pada tahun 1994 menjadi 4,2 persen. Sementara itu persentase penduduk buta huruf di daerah pedesaan pada tahun 1990 sebesar 24,2 persen turun menjadi 19,6 persen pada tahun 1994.

Lebih jauh lagi Tabel 2.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk buta huruf di setiap kabupaten secara keseluruhan (K+D) pada tahun 1994 menurun. Namun demikian di kabupaten-kabupaten Sumba Barat dan TTS penurunannya relatif kecil. Pada tahun 1990 di antara dua belas kabupaten di NTT terdapat tiga kabupaten yang persentase penduduk buta hurufnya di atas 30 persen, yaitu Sumba Barat (31,4 persen), Timor Tengah Selatan (31,9 persen), dan Belu (33,7 persen). Sementara itu terdapat tiga kabupaten dengan persentase penduduk buta huruf di bawah 16 persen yaitu Ende (15,5 persen), Ngada (13,6 persen), dan Alor (12,9 persen). Kemudian pada tahun 1994 tinggal Kabupaten Sumba Barat yang persentase buta hurufnya masih di atas 30 persen, dan tujuh kabupaten persentase buta hurufnya telah dibawah 15 persen.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Kabupaten dan Daerah 1990 dan 1994

Kabupaten	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	1990	1994	1990	1994	1990	1994
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.Sumba Barat	7,5	6,4	32,8	32,3	31,4	30,5
02.Sumba Timur	4,2	4,0	29,8	23,6	25,2	18,4
03.K u p a n g	4,0	3,3	22,6	16,2	17,2	12,3
04.Timor T.Selatan	5,3	0,0	33,5	31,8	31,9	29,7
05.Timor T.Utara	-	-	26,0	21,9	26,0	21,9
06.B e l u	4,5	4,6	35,6	27,9	33,7	26,2
07.A l o r	4,6	6,6	14,1	5,1	12,9	5,3
08.Flores Timur	10,5	4,5	22,2	15,4	21,4	14,5
09.S i k k a	4,3	2,1	19,9	17,5	17,7	14,7
10.E n d e	7,5	10,8	17,9	13,6	15,5	12,9
11.N g a d a	3,0	0,0	14,3	11,4	13,6	10,5
12.Manggarai	5,0	3,5	19,5	14,2	18,7	13,4
N T T	5,1	4,2	24,2	19,6	21,9	17,4

## 2.2. Tingkat Pendidikan Penduduk.

Komposisi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia di daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan 1987, 1990, 1993 dan 1995

Pendidikan yang ditamatkan	1987 <sup>1)</sup>	1990 <sup>2)</sup>	1993 <sup>1)</sup>	1995 <sup>1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tidak/belum pernah sekolah	22,5	19,8	15,7	17,2
2. Belum tamat SD	42,2	38,1	40,9	36,7
3. Tamat SD	26,0	28,3	29,4	29,3
4. Tamat SMTP	5,1	6,7	6,7	7,6
5. Tamat SMTA	3,8	6,1	6,3	7,5
6. Tamat Akademi/Universitas	0,4	1,0	1,1	1,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Keterangan : 1) Hasil SUSENAS  
2) Hasil Sensus Penduduk

Pembangunan bidang pendidikan telah menunjukkan hasil yaitu meningkatnya tingkat pendidikan penduduk dari waktu ke waktu. Kalau pada tahun 1987 penduduk NTT yang berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 22,5 persen, maka pada tahun 1990 persentase tersebut mengecil yaitu menjadi 19,8 persen, dan tahun 1995 turun lagi menjadi 17,2 persen. Demikian pula persentase mereka yang tidak/belum tamat SD juga semakin menurun, yaitu dari 42,2 persen pada tahun 1987 menjadi 38,1 persen pada tahun 1990, dan kemudian tahun 1995 menjadi 36,7 persen. Sebaliknya persentase mereka yang dapat menamatkan pendidikan pada tingkat SD, SMTP, SMTA, dan Akademi/Universitas telah meningkat seperti tampak pada tabel di atas.

Namun demikian pendidikan penduduk NTT masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada jenjang pendidikan menengah ke atas agar dapat menyamai tingkat pendidikan penduduk secara Nasional.

### BAB III KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih luas, lebih merata, sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Upaya penyediaan berbagai fasilitas dan tenaga kesehatan, penyuluhan, pengaturan pola makan, serta pengaturan pola hidup sehat akan menghasilkan tingkat kesehatan yang tinggi. Tingkat atau derajat kesehatan yang tinggi pada suatu masyarakat akan memperkecil tingkat kematian, utamanya tingkat kematian bayi dan anak, yang pada gilirannya akan memperpanjang Angka (umur) Harapan Hidup (AHP). Kalau pada tahun 1977 AHP seorang penduduk NTT pada waktu lahir baru mencapai 48,8 tahun, maka pada tahun 1987 telah mencapai 58,6 tahun dan pada tahun 1994 telah mencapai 63,2 tahun.

#### 3.1. Perkembangan Fasilitas Kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah terus membangun berbagai fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh penduduk daerah pedesaan, baik ditinjau dari segi biaya pengobatan maupun dari segi jarak ke fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel 3.1. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di  
Nusa Tenggara Timur, 1991 - 1995

Fasilitas Kesehatan	1991	1992	1993	1994	1995
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah Sakit	24	24	24	24	24
2. Puskesmas	162	178	202	203	204
3. Puskesmas Pembantu	585	610	642	686	728
4. Puskesmas Keliling	150	145	186	172	175
5. Balai Pengobatan	81	85	74	69	60
6. Posyandu	5 208	5 908	6 023	6 119	6 244

Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan jumlah fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun di Nusa Tenggara Timur. Jumlah

Rumah Sakit sejak tahun 1991 tidak berubah yaitu 24 buah, akan tetapi jumlah fasilitas kesehatan lainnya bertambah cukup pesat. Puskesmas yang pada tahun 1991 berjumlah sebanyak 162 buah, pada tahun 1995 sudah mencapai jumlah 204 buah, kemudian Puskesmas Pembantu dari jumlah 585 buah pada tahun 1991 bertambah menjadi 728 buah pada tahun 1995. Demikian pula untuk Puskesmas Keliling pada tahun 1991 sebanyak 150 unit menjadi 175 unit pada tahun 1995. Demikian juga halnya dengan Posyandu dimana meningkat dari 5 208 buah pada tahun 1991 menjadi 6 244 pada tahun 1995; sedangkan Balai Pengobatan cenderung menurun yakni dari 81 buah pada tahun 1991 menjadi 60 buah pada tahun 1995.

Tabel 3.2. Banyaknya Tenaga Kesehatan di NTT  
1989 - 1995 (Orang)

Tenaga Kesehatan	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Dokter	144	124	101	281	347	386	274
2. Perawat	1 230	1 051	813	1 383	1 473	1 674	1 893
3. Bidan	196	278	236	368	560	937	1 094

Tabel 3.2. menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang sangat pesat terutama untuk perawat dan bidan. Kalau pada tahun 1990 seorang dokter harus siap melayani 26 500 penduduk, maka pada tahun 1995 cukup melayani rata-rata 12 900 orang saja. Demikian juga perawat yang pada tahun 1990 melayani 3 000 orang, menjadi cukup melayani 1 867 orang 1995. Bidan yang pada tahun 1990 jumlahnya hanya 278 orang, sekarang sudah mencapai 1 094 orang pada tahun 1995 di seluruh NTT.

Dampak dari pembangunan bidang kesehatan tersebut tampak dari menurunnya tingkat kematian bayi dan anak serta meningkatnya angka harapan hidup.

### 3.2. Status Gizi Balita.

Salah satu program peningkatan kesehatan masyarakat adalah program perbaikan gizi masyarakat, diantaranya melalui Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Berdasarkan hasil-hasil penelitian ditemukan bahwa masalah gizi utama di Indonesia adalah Kurang Kalori Protein (KKP), kekurangan vitamin A, gondok endemik, dan leukemia zat besi. Kekurangan energi dan protein pada anak akan mengakibatkan antara lain pertumbuhan fisiknya terhambat dan tingkat kecerdasan rendah. Untuk orang dewasa, defisiensi tersebut dapat menurunkan produktivitas kerja, derajat kesehatan yang kurang optimal, serta kerentanan terhadap penyakit.

Pengukuran status gizi (antropometri) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) hanya ditujukan terhadap anak balita (0-4 tahun), mengingat mereka adalah golongan rawan gizi yang bukan saja mudah terkena defisiensi gizi, tetapi juga makannya tergantung kepada orang lain.

Tabel 3.3. Persentase Banyaknya Anak Balita Menurut Status Gizi dan Daerah 1987, 1989 dan 1995

Daerah	1987		1989		1995	
	Baik/ Sedang	Kurang/ Buruk	Baik/ Sedang	Kurang/ Buruk	Baik/ Sedang	Kurang/ Buruk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)	91,4	8,6	91,6	8,4	88,6	11,4
Pedesaan (D)	84,8	15,2	83,2	16,8	79,7	20,3
K + D	85,3	14,7	84,0	16,0	80,8	19,2

Tabel.3.3 menunjukkan bahwa persentase banyaknya anak balita status gizi kurang/buruk sejak tahun 1987 hingga tahun 1995 terus meningkat yakni dari 14,7 persen pada tahun 1987 menjadi 19,2 persen pada tahun 1995. Sampai tahun 1995 persentase terbesar dari anak balita yang kurang/buruk status gizinya adalah di daerah pedesaan sebesar 20,3 persen.

**BAB IV**  
**KETENAGAKERJAAN**

Masalah kependudukan selalu tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan sangat berpengaruh pada tingginya pertumbuhan angkatan kerja, berarti tingginya penawaran atau penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti lowongan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

**4.1. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tabel 4.1. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Sebelum Pencacahan 1989 - 1995

Kegiatan	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Angkatan Kerja	1 611 735	1 658 112	1 601 460	1 603 552	1 705 965	1 733 877	1 742 650
- Bekerja	1 598 585	1 647 274	1 588 711	1 584 325	1 684 225	1 704 401	1 705 974
- Mencari Pekerjaan	13 150	10 838	12 749	19 227	21 740	29 476	36 676
2. Bukan Angkatan Kerja							
- Sekolah	486 225	488 018	437 261	442 599	427 324	446 520	446 815
- Mengurus Rumah tangga	165 622	167 435	199 429	233 664	247 094	228 762	250 004
- Lainnya	135 947	149 211	141 090	145 970	134 923	146 279	157 589
<b>Jumlah</b>	<b>2 399 529</b>	<b>2 464 776</b>	<b>2 379 240</b>	<b>2 425 785</b>	<b>2 515 306</b>	<b>2 555 438</b>	<b>2 597 058</b>
3. TPAK (%)	67,2	67,3	67,3	66,1	67,8	67,9	67,1
4. Tingkat Pengangguran (%)	0,8	0,7	0,8	1,2	1,3	1,7	1,4

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)  
\*) SUSENAS 1995

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan jumlah angkatan kerja pada kurun waktu 1989-1995 berfluktuasi di sekitar 1,7 juta

orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran terlihat meningkat seperti tertera di dalam tabel. Namun demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk kurun waktu tersebut cenderung berfluktuasi, yaitu dari 67,2 persen pada tahun 1989, meningkat menjadi 67,3 pada tahun 1990 dan 1991 kemudian turun menjadi 66,1 persen pada tahun 1992, dan dan naik kembali pada tahun 1993-1995. Pada tahun 1995 TPAK NTT mencapai 67,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja di NTT relatif labil, karena produktivitas pada sektor pertanian yang menyerap hampir 80 persen belum efektif pengelolaannya. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat, yakni dari 0,8 persen pada tahun 1989 menjadi 1,4 persen pada tahun 1995. Tingkat pengangguran di NTT ini cukup rendah bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran secara Nasional yang pada tahun 1992 sebesar 2,7 persen. Rendahnya tingkat pengangguran (pengangguran terbuka) di NTT bukan karena tersedianya kesempatan/lowongan kerja yang banyak, atau kurangnya minat bekerja penduduk di daerah ini, tetapi bisa disebabkan adanya pencari kerja yang "apatis", "putus asa", dan atau "malu-malu" yang dalam SAKERNAS tercatat sebagai bukan angkatan kerja ("lainnya"), dan karena banyaknya tanggungan/anggota rumah tangga, banyak penduduk yang disebut bekerja hanya karena sopan santun terhadap keluarga/orang tua, padahal bekerjanya hanya 1 jam atau lebih dalam seminggu. Tetapi apabila digunakan kriteria bahwa orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dianggap setengah penganggur, maka sekitar separuh penduduk yang bekerja di NTT tergolong setengah penganggur (under employment).

#### 4.2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan.

Bagian terbesar dari pada penduduk yang bekerja di NTT masih menggantungkan harapannya di sektor pertanian yakni sebanyak 80,2 persen. Sejak tahun 1992 hingga tahun 1994 penduduk yang bekerja di sektor pertanian menurun baik secara absolut maupun secara persentatif. Namun pada tahun 1995 kembali meningkat lagi menjadi 1 330 994 orang (78,0 persen) seperti tergambar dalam Tabel 4.2. Penduduk yang berkerja di sektor perdagangan cenderung meningkat dalam kurun waktu 1992-1995. Sementara yang bekerja di sektor

industri dan jasa sangat fluktuatif, yaitu sekitar 250 ribu orang atau sekitar 14,8 persen. Sektor-sektor lainnya relatif kecil penyerapan tenaga kerjanya.

Dengan demikian sektor pertanian perlu mendapat perhatian dari berbagai instansi yang terkait, karena sektor inilah yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT.

Tabel 4.2. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 1989 - 1995

Lapangan Pekerjaan	1989	1990	1991	1992	1993 <sup>*)</sup>	1994 <sup>*)</sup>	1995 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	1 282 036 (80,2)	1 341 501 (81,4)	1 292 093 (81,3)	1 221 903 (77,1)	1 311 792 (77,9)	1 355 415 (79,5)	1 330 994 (78,0)
2. Industri	125 608 (7,9)	98 207 (6,0)	108 500 (6,8)	130 469 (8,3)	111 891 (6,6)	96 788 (5,7)	85 930 (5,0)
3. Perdagangan	40 505 (2,5)	53 239 (3,2)	45 339 (2,9)	55 758 (3,5)	59 828 (3,6)	62 768 (3,7)	69 134 (4,0)
4. Jasa-jasa	117 307 (7,3)	123 041 (7,5)	108 626 (6,8)	130 010 (8,2)	137 692 (8,2)	128 149 (7,5)	166 837 (9,8)
5. Lainnya	33 127 (2,1)	31 286 (1,9)	34 153 (2,2)	46 185 (2,9)	63 022 (3,7)	61 281 (3,6)	53 079 (3,1)
6. Tidak tahu	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sakernas  
\*) SUSENAS

Begitu juga sektor industri dan sektor perdagangan yang masih sedikit menampung tenaga kerja di luar sektor pertanian, perlu mendapat perhatian dalam pembangunan ekonomi, karena sektor inilah yang perlu dipacu bertumbuh dengan cepat searah dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara sektor jasa baru bisa dipacu lebih cepat lagi sesudah sektor sekunder di atas mantap pertumbuhannya.

**BAB V**  
**PENDAPATAN REGIONAL**



Pendapatan Regional adalah jumlah produk atau nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, pendapatan regional juga disebut sebagai indikator keadaan perekonomian penduduk di wilayah/daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi umumnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran penduduk. Melalui pembangunan ekonomi pendapatan masyarakat terus meningkat yang tergambar dari pertumbuhan nilai tambah pada setiap sektor ekonomi yang diusahakan. Pertumbuhan dari suatu sektor tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor tersebut, akan tetapi dapat juga dipengaruhi oleh pembangunan di sektor-sektor lain, terutama sarana dan prasarana sektor terkait.

**5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku.**

Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 47 349,9 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta pada pertengahan tahun 1995 menghasilkan PDRB dengan harga berlaku sebesar 2 880,17 milyar rupiah (atau meningkat sebesar 17,25 persen dari tahun sebelumnya). Percepatan pertumbuhan PDRB tahun 1995 ini terlihat lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17,15 persen. Namun lebih rendah bila dibanding dengan pertumbuhan Nasional yang mencapai 18,64 persen dalam periode yang sama. Pembangunan diberbagai sektor ekonomi dan sosial di Nusa Tenggara Timur telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat yang ditunjukkan dengan data pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun, seperti disajikan dalam tabel 5.1.

Dari tahun ke tahun besarnya PDRB Nusa Tenggara Timur terus berkembang cukup pesat. Pada awal PELITA I (tahun 1969) PDRB harga berlaku NTT hanya sekitar 24,88 milyar rupiah terus meningkat hingga mencapai 2 880,17 milyar rupiah pada tahun 1995. Percepatan pertumbuhan yang cukup tinggi nampaknya terjadi pada awal-awal pelita, terutama pada PELITA I, II dan III. Hal

ini disebabkan karena rangsangan Program PELITA pada waktu itu yang mana lebih ditekankan pada peningkatan produksi pangan disamping juga karena pengaruh laju inflasi yang relatif tinggi. Pada PELITA IV nampaknya pembentukan nilai tambah sektor ekonomi tidak banyak melonjak.

Tabel 5.1. PDRB Harga Berlaku Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sejak Awal PELITA s/d Tahun 1995

Periode/Tahun	Nusa Tenggara Timur		I n d o n e s i a	
	PDRB (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)*)	PDRB (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Pra PELITA 1969	24,88	-	3 864,1	
- Akhir PELITA I (1973)	59,94	33,51	6 753,4	15,10
- Akhir PELITA II (1978)	186,98	25,62	27 746,0	28,30
- Akhir PELITA III (1983)	498,31	21,67	77 676,3	28,45
- Akhir PELITA IV (1988)	938,12	13,53	142 104,8	12,98
- Akhir PELITA V (1993) <sup>r)</sup>	2 096,82	17,59	296 861,2	16,58
1994 <sup>r)</sup>	2 456,36	17,15	345 951,7	16,44
1995 <sup>**)</sup>	2 880,17	17,25	410 438,4	18,64

\*) Selain tahun 1994 & 1995, adalah rata-rata pertumbuhan/tahun setiap PELITA ybs. Pertumbuhan ini bukan pertumbuhan ekonomi.

\*\*\*) Angka sementara.

r) Angka perbaikan.

Peningkatan PDRB yang cukup pesat tersebut tentunya juga telah meningkatkan pendapatan penduduk daerah ini yang berarti juga telah meningkatkan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur.

Keadaan yang sama juga terjadi di daerah lain di Indonesia, bahkan didaerah lain cenderung lebih pesat. Hal ini nampak dari sumbangan PDRB daerah ini terhadap nasional yang relatif tidak meningkat selama ini. Pada awal PELITA I sumbangan PDRB NTT terhadap nasional sebesar 0,64 persen dan selanjutnya pada tahun

1995 hanya 0,70 persen. Sumbangan PDRB ini juga lebih rendah dibanding penduduknya (1,81 persen dari penduduk Nasional). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan kesejahteraan ekonomi penduduk daerah ini masih di bawah rata-rata keadaan Nasional. Oleh karena itu pembangunan dibidang ekonomi termasuk sarannya di daerah ini perlu ditingkatkan lebih cepat lagi untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain.

Gambaran nilai tambah dari setiap lapangan usaha seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 1993 - 1995. (Ribuan rupiah)

Lapangan Usaha	1993	1994 <sup>r)</sup>	1995 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
01.Pertanian	857 962 153	998 221 051	1 143 833 494
02.Pertambangan dan Penggalian	32 611 992	38 090 380	47 371 221
03.Industri Pengolahan	52 672 675	66 902 250	73 484 093
04.Listrik, Gas dan Air Minum	15 617 038	17 399 196	22 967 595
05.Bangunan / Konstruksi	169 664 641	196 773 743	246 807 672
06.Perdagangan, Restoran & Hotel	262 190 317	287 995 044	343 575 094
07.Pengangkutan dan Komunikasi	193 380 451	235 453 774	288 299 617
08.Bank, Lemb.Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	91 325 137	108 313 791	125 892 930
09.J a s a - j a s a	421 392 484	507 208 310	587 936 229
<b>T o t a l P D R B</b>	<b>2 096 816 888</b>	<b>2 456 357 539</b>	<b>2 880 167 946</b>

Keterangan : r) Angka perbaikan  
\*) Angka sangat sementara

Kegiatan perekonomian penduduk daerah ini sampai tahun 1995 sebagian besar masih bersumber dari Sektor Pertanian yakni sebesar 1 143,83 milyar rupiah atau sekitar 40 persen dari total PDRB. Kegiatan industri pengolahan belum menunjukkan peran yang berarti (hanya 3 persen kontribusinya terhadap PDRB) dalam memacu perekonomian penduduk. Kegiatan industri yang terbanyak disini adalah industri kerajinan rumah tangga yang mana produktivitasnya sangat rendah, sekalipun sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi ini berbeda dengan tingkat nasional, yang mana peran sektor industri sangat dominan dalam pembentukan PDBnya.

Disamping sektor pertanian tercatat pula beberapa sektor lainnya yang cukup besar perannya seperti Jasa-jasa (20 persen kontribusinya) dan juga Perdagangan dan Pengangkutan masing-masing sebesar 12 persen dan 10 persen. Tingginya peran sektor jasa-jasa ini lebih didominasi oleh kegiatan jasa pemerintahan; sedangkan kegiatan jasa-jasa swasta belum berkembang dengan baik di daerah ini. Sedangkan untuk kegiatan perdagangan lebih banyak didominasi oleh perdagangan komoditi hasil pertanian.

## 5.2. Pendapatan Perkapita Penduduk.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah adalah besaran pendapatan yang diterima penduduknya. Gambaran pendapatan per kapita penduduk Nusa Tenggara Timur dibanding dengan Nasional seperti terlihat pada Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3. Rata-rata Pendapatan per Kapita Penduduk  
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia  
Sejak Ada PELITA  
(rupiah/tahun)

T a h u n	Nusa Tenggara Timur		I n d o n e s i a	
	Pend./kapita	(%) <sup>*</sup>	Pend./kapita per tahun <sup>*</sup>	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Pra PELITA (1969)	10 297	-	22 246	-
- Akhir PELITA I (1973)	19 030	24,36	46 073	24,74
- Akhir PELITA II (1978)	70 173	24,53	138 538	25,38
- Akhir PELITA III (1983)	167 131	18,72	435 929	22,73
- Akhir PELITA IV (1988)	288 633	11,59	694 719	10,77
- Akhir PELITA V (1993) <sup>r)</sup>	587 475	-	1 490 297	-
(1994) <sup>**</sup>	678 857	15,56	1 684 805	13,05
(1995) <sup>***</sup>	785 281	15,68	1 940 962	15,20

\*\*) Angka sementara.

\*\*\*) Angka sangat sementara.

r) Angka perbaikan.

Selama PELITA berjalan, pendapatan perkapita daerah ini telah meningkat hampir tujuh puluh kali lipat sejak awal PELITA I, yakni dari sebesar 10 297 rupiah pada tahun 1969

menjadi 785 281 rupiah pada tahun 1995. Pertumbuhan pendapatan regional per kapita lebih terasa pada era PELITA II dan III, yakni rata-rata di atas 19 persen setahun. Tingginya pertumbuhan pada waktu itu lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya inflasi yang terjadi pada periode tersebut.

Dibanding dengan keadaan penduduk Indonesia, pendapatan per kapita penduduk Propinsi ini masih jauh lebih rendah. Pada akhir PELITA V (tahun 1993) pendapatan per kapita penduduk Nasional telah mencapai 1 490 297 rupiah, sedangkan Nusa Tenggara Timur hanya mencapai sekitar 541 139 rupiah. Kemudian pada tahun 1995, pendapatan perkapita NTT meningkat menjadi 785 281 rupiah, di tingkat Nasional mencapai hampir 2 juta rupiah. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk daerah ini pada umumnya disebabkan beberapa kendala. Keterbatasan sumber daya alam, keadaan geografis dan keterbatasan sumber daya manusia menyulitkan daerah ini untuk ditingkatkan produk ekonominya. Pembangunan di daerah ini menuntut kita bekerja lebih keras untuk mengatasi kendala-kendala tersebut terutama untuk menggali sumber daya alam yang merupakan produk unggulan lebih intensif lagi seperti perikanan, perkebunan dan peternakan guna meningkatkan produk daerah ini lebih cepat dari sebelumnya.

Tabel 5.4. Rata-rata Pendapatan per Kapita Nusa Tenggara Timur di Perinci Menurut Kabupaten Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)

Kabupaten	1993	1994	1995
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sumba Barat	448 642	528 052	552 932
02. Sumba Timur	779 742	908 722	1 011 278
03. Kupang	984 407	1 167 896	1 386 480
04. T. T. S.	441 755	544 033	587 498
05. T. T. U.	554 938	625 425	672 219
06. Belu	514 441	593 939	676 832
07. Alor	569 038	636 482	748 481
08. Flores Timur	440 711	518 876	607 238
09. Sikka	528 184	629 274	698 310
10. Ende	642 342	732 223	816 183
11. Ngada	560 459	625 440	720 930
12. Manggarai	466 624	518 697	570 830
Nusa Tenggara Timur	587 475	678 857	785 281

Keterangan : r) Angka perbaikan  
\*) Angka sementara

Kendatipun demikian tercatat pula tiga kabupaten yaitu Kupang, Sumba Timur dan Ende yang cukup besar pendapatan perkapitanya pada tahun 1995 ini yakni masing-masing sebesar 1 386 480 rupiah, 1 011 278 rupiah dan 816 183 rupiah. Kabupaten Kupang menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita yang lebih cepat yaitu dari 462 342 rupiah pada tahun 1989 menjadi 1 386 480 rupiah pada tahun 1995.

Sampai dengan tahun 1995 tercatat tiga kabupaten yang pendapatan per kapita penduduknya dibawah 600 ribu rupiah yaitu Kabupaten Sumba Barat sebesar 552 932 rupiah, Manggarai sebesar 570 830 rupiah dan TTS sebesar 587 498 rupiah.

### 5.3. Pertumbuhan Ekonomi.

PDRB atas dasar harga yang berlaku pada suatu waktu (tahun) adalah produk/nilai tambah dari barang/jasa yang dihitung dengan harga pada waktu/saat barang yang dihasilkan tersebut dijual. Kenaikan PDRB harga berlaku tidak menggambarkan perkembangan produksi riil dari barang/jasa tersebut karena pengaruh kenaikan harga (inflasi) masih terkandung didalamnya. Untuk mendapatkan pertumbuhan produksi yang riil (pertumbuhan ekonomi) maka barang/jasa yang dihasilkan pada setiap periode harus dihitung berdasarkan harga pada suatu tahun dasar tertentu sebagai tahun dasar (konstan). Harga tahun dasar tersebut ditentukan berdasarkan kriteria seperti relatif stabilnya fluktuasi harga pada tahun

Tabel 5.5. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Indonesia  
Per Tahun Sejak Ada PELITA  
( % / tahun )

T a h u n	Nusa Tenggara Timur	Indonesia
(1)	(2)	(3)
1969 - 1973 PELITA (I)	3,53	8,81
1974 - 1978 PELITA (II)	10,27	7,22
1979 - 1983 PELITA (III)	9,73	6,10
1984 - 1988 PELITA (IV)	4,89	5,19
1989 - 1993 PELITA (V)	7,32	6,92
1994*)	8,55	7,48
1995**)	8,86	8,07

Keterangan : \*) Angka perbaikan.

\*\*\*) Angka sementara.

tersebut. Sejak penghitungan tahun 1993, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 1993. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah merupakan kenaikan PDRB riil dari tahun ke tahun yang diperoleh dari pertumbuhan/perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator perkembangan ekonomi dari suatu daerah.

Pembangunan di daerah ini setiap tahun telah menunjukkan keberhasilannya seperti terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi NTT diperkirakan sebesar 8,86 persen, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 8,55 persen.

Pola laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur sejak Pelita II sampai sekarang, hampir sama dengan keadaan Nasional. Pada periode Pelita I pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Timur hanya sekitar 3,53 persen, sementara pertumbuhan Nasional telah mencapai rata-rata 8,81 persen per tahun. Pada periode PELITA I Pembangunan Nusa Tenggara Timur masih diarahkan pada pembangunan sektor-sektor infra struktur yang tidak banyak berpengaruh langsung kepada pertumbuhan ekonomi.

Pada Pelita II dan III, NTT menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, rata-rata antara 9-10 persen per tahun, lalu menurun secara drastis pada Pelita IV menjadi hanya rata-rata 4,89 persen per tahun. Dalam Pelita V pertumbuhan ekonomi meningkat lagi dengan rata-rata 7,32 persen per tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.5 di atas.

Secara umum struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur kurang menguntungkan dibanding struktur ekonomi Nasional. Peranan sektor pertanian di Propinsi ini relatif sangat besar yakni 38,1 persen pada tahun 1995 jauh lebih besar dibanding Nasional yang hanya 17,7 persen. Peranan sektor industri di tingkat Nasional relatif besar yakni sekitar 23,4 persen, sedangkan di NTT hanya sebesar 2,6 persen. Tingginya peran industri nasional disebabkan karena sebagian besar kegiatan industrinya adalah industri barang-barang elektronik yang di daerah ini belum ada. Walaupun demikian sejak tahun 1979 sampai tahun 1989, terlihat bahwa dari tahun ke tahun

terjadi perubahan struktur ekonomi di daerah ini. Sektor-sektor perdagangan, angkutan, jasa dan lainnya, peranannya semakin besar sementara peranan sektor pertanian dari tahun ke tahun menjadi semakin kecil walaupun masih dominan. Sektor industri terlihat belum banyak berkembang. Kegiatan sektor industri di NTT, sebagian besar masih didominasi industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang pertumbuhannya masih kecil. Oleh sebab itu perhatian dan pembinaan terhadap usaha-usaha industri kecil dan rumahtangga ini harus terus ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.



Tabel 5.6. Struktur Ekonomi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Sejak PELITA III \*)

Sektor	Nusa Tenggara Timur					Indonesia				
	1979*) (P.III)	1984*) (P.IV)	1989*) (P.V)	1994*) (P.VI)	1995	1979*) (P.III)	1984*) (P.IV)	1989*) (P.V)	1994 <sup>r)</sup> (P.VI)	1995
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Pertanian	69,5	55,3	51,1	40,0	38,1	32,0	22,2	20,4	18,5	17,7
02. Pert. dan Penggalian	0,3	0,5	0,6	1,6	1,7	10,3	20,9	15,5	3,0	3,3
03. Industri	3,2	2,3	2,0	2,6	2,6	13,7	14,6	18,5	26,6	23,4
04. Listrik, Gas & Air Minum	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,6	1,2	1,2
05. Bangunan	2,3	3,0	3,6	8,1	8,8	5,5	5,3	5,5	8,1	8,4
06. Perdagangan	9,9	11,6	12,1	11,9	12,4	16,5	14,2	16,1	18,5	18,3
07. Pengangkutan	3,0	6,5	8,5	9,8	10,5	5,5	5,4	5,4	7,8	7,8
08. Bank & lainnya Sewa Rumah	0,5	1,2	1,3	4,4	4,3	1,8	3,4	4,0	9,6	9,8
09. Pemerintahan Jasa-jasa	15,8	15,1	16,3	20,9	20,9	7,9	7,2	7,8	10,7	10,1
P D R B	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Keterangan : \*) Keadaan setiap awal PELITA. Berdasar PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1983.

\*\*\*) Angka sangat sementara

r) Angka perbaikan

#### 5.4. Pertumbuhan Ekonomi di Setiap Kabupaten.

Pertumbuhan ekonomi secara umum di setiap kabupaten dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7. Pertumbuhan Ekonomi di Setiap Kabupaten Sejak PELITA III (%) <sup>1)</sup>  
% / tahun )

Kabupaten	Rata- Rata 1979- 1983	Rata- Rata 1984- 1988	Rata- Rata 1989- 1993	1994	1995
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.Sumba Barat	9,33	2,51	6,66	8,51	2,49
02.Sumba Timur	11,77	3,76	7,16	9,30	6,77
03.K u p a n g	12,12	6,55	9,54	10,92	13,62
04.Timor T.Selatan	11,77	6,17	6,07	9,82	5,96
05.Timor T. Utara	7,79	3,38	7,46	7,59	2,91
06.B e l u	10,88	6,43	7,42	7,30	9,67
07.A l o r	7,13	2,74	5,18	5,58	10,90
08.Flores Timur	6,36	2,76	5,97	6,82	12,51
09.S i k k a	11,98	6,37	5,37	7,57	7,88
10.E n d e	8,61	5,73	8,63	6,51	6,00
11.N g a d a	9,55	5,41	7,27	6,34	10,03
12.Manggarai	9,23	3,71	6,13	6,47	5,32
Nusa Tenggara Timur	10,08	4,89	7,52	8,55	8,86

Keterangan : 1) Tahun dasar 1983

Selama Pelita III laju pertumbuhan ekonomi dari setiap kabupaten cukup pesat, dengan rata-rata antara 6 persen sampai 12 persen per tahun. Setelah itu laju pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten pada umumnya mengalami kelambanan. Pada PELITA IV laju pertumbuhan ekonomi kabupaten hanya berkisar 2 persen sampai 7 persen per tahun. Keadaan ekonomi yang lesu ini tidak saja dialami oleh Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dialami oleh Nasional.

Kabupaten-kabupaten di Pulau Sumba selama PELITA IV (tahun 1984 s/d 1988) tidak menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berarti. Pada tahun 1984, laju pertumbuhan ekonomi Sumba Barat sekitar 5,33 persen, setelah itu mengalami pertumbuhan minus pada tahun 1985 (-2,21 persen), tahun 1986 naik sedikit 1,97 persen. Kemudian pada tahun 1987, pertumbuhan ekonomi Sumba Barat menjadi 2,40 persen. Setelah itu pada tahun 1988 tumbuh 3,85 persen, kemudian tahun 1989 meningkat 5,63 persen, tahun 1990 meningkat lagi 8,07 persen, tetapi tahun 1991 sedikit melambat 6,49 persen dan tahun 1992 meningkat sebesar 7,95 persen, kemudian pada tahun 1995 melambat lagi menjadi 2,49 persen.

Perekonomian Sumba Timur lebih baik dibandingkan dengan Sumba Barat, pada periode PELITA III dan IV. Memasuki PELITA V perekonomian Sumba Timur berkembang hanya sekitar 7 persen per tahun. Selanjutnya pada tahun 1995 perekonomian kabupaten ini bertumbuh lagi sebesar 6,77 persen.

Kabupaten Kupang selama tahun 1985 dan 1986 masih menunjukkan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada tahun 1987 agak lamban pertumbuhannya (4,30 persen) dan tahun 1988 sedikit lebih lambat (3,94 persen). Tetapi sejak tahun 1989 sampai 1991 keadaannya lebih baik. Tahun 1989 perekonomian Kabupaten Kupang tumbuh sekitar 6,77 persen, tahun 1990 meningkat lagi menjadi 8,09 persen meningkat menjadi 9,76 persen pada tahun 1991, meningkat lagi pada tahun 1992 mencapai 9,89 persen, dan pada tahun 1995 meningkat lagi menjadi 13,62 persen.

Kabupaten Timor Tengah Selatan bertumbuh dengan cepat sejak tahun 1985 sampai 1987. Nampaknya Timor Tengah Selatan memacu ketinggalannya dari daerah lain. Pada tahun-tahun tersebut agak lambat akibat turunnya pertumbuhan sektor pertanian yang merupakan leading sektor (63,28 persen kontribusi), saat mana sektor-sektor non pertanian juga tumbuh lambat. Seperti halnya dengan kabupaten lainnya, pertumbuhan ekonomi Timor Tengah Selatan juga meningkat sekitar 4,89 persen pada tahun 1989 dan meningkat lagi 6,80 persen pada tahun 1990, pada tahun 1991 pertumbuhannya sedikit lebih rendah hanya sekitar 3,85 persen namun pada tahun 1992 pertumbuhannya meningkat menjadi 7,81 persen. Pada tahun 1995 Kabupaten ini meningkat lagi sebesar 5,96 persen.

**BAB VI**  
**PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI PENDUDUK**

**6.1. Pola Pengeluaran Penduduk.**

Besaran dan komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dikatakan semakin baik apabila persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran semakin kecil.

Data Susenas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk NTT cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pendapatan mereka. Pada tahun 1987 besarnya pengeluaran per kapita penduduk NTT adalah 15 998 rupiah meningkat menjadi 20 511 rupiah pada tahun 1990, kemudian menjadi Rp. 28 775,- pada tahun 1993 serta sebesar 29 602 rupiah pada tahun 1994 dan 33 650 rupiah pada tahun 1995.

Tabel 6.1. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita  
Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan  
1984 - 1994

Daerah dan Jenis Pengeluaran	1987	1990	1993	1994	1995
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PERKOTAAN</b>					
a. Makanan	53,7	57,9	52,4	59,8	54,3
b. Bukan Makanan	46,3	42,1	47,6	40,2	45,7
<b>PEDESAAN</b>					
a. Makanan	73,9	72,2	71,4	74,5	72,4
b. Bukan Makanan	26,1	27,8	28,6	25,5	27,6
<b>PERKOTAAN + PEDESAAN</b>					
a. Makanan	70,4	69,4	67,2	71,4	68,3
b. Bukan Makanan	29,6	30,6	32,8	28,6	31,7

Tabel 6.1 menunjukkan perbandingan persentase pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan menurut daerah. Secara umum (perkotaan + pedesaan) persentase pengeluaran per kapita untuk

makanan terhadap total pengeluaran penduduk sekitar 70 persen, tepatnya 70,4 persen untuk tahun 1987, 69,4 persen untuk tahun 1990, 67,2 persen pada tahun 1993, 71,4 persen pada tahun 1994 dan tahun 1995 sebesar 68,3 persen. Terlihat persentase (proporsi) pengeluaran untuk makanan berfluktuasi.

Kalau diamati lebih jauh antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, maka terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan di daerah perkotaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Walaupun demikian terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan di daerah pedesaan cenderung menurun, sementara di daerah perkotaan berfluktuasi.

Secara absolut pengeluaran rata-rata untuk makanan mengalami kenaikan dari 21 242 rupiah (1994) menjadi 22 985 (1994), atau naik sekitar 8,7 persen. Demikian halnya juga untuk pengeluaran bukan makanan meningkat dari 8 460 rupiah (1994) menjadi 10 665 rupiah (1995) atau sekitar 26,1 persen.

## 6.2. Tingkat Ketidakmerataan Pendapatan.

Indikator ekonomi makro yang sering dipakai untuk melihat tingkat ketidakmerataan pendapatan penduduk suatu negara/daerah adalah Indeks Gini (Gini Ratio) dan Kriteria Bank Dunia. Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga golongan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Ukuran ketidakmerataan versi Bank Dunia tersebut terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Apabila kelompok ini memperoleh kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan penduduk maka dikatakan bahwa tingkat ketidakmerataannya tinggi. Ketidakmerataan pendapatan dikatakan sedang apabila kelompok tersebut menerima antara 12 sampai 17 persen dari seluruh pendapatan penduduk, dan dikatakan rendah apabila menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan penduduk.

Mengingat data pengeluaran dianggap lebih teliti dibandingkan data pendapatan dan juga tersedia dalam beberapa tahun, maka penghitungan tingkat ketidakmerataan pendapatan didekati dengan

data pengeluaran. Tingkat ketidakmerataan pengeluaran kiranya cukup representatif untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.2 menunjukkan perkiraan persentase pembagian pendapatan (pengeluaran) per kapita menurut kelompok penduduk untuk tahun 1984, 1987, 1990, 1993 dan 1994. Secara umum terlihat bahwa tingkat ketidakmerataan pendapatan penduduk di NTT termasuk dalam katagori rendah, baik pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993 maupun 1994. Bila ditinjau dari Indeks Gininya juga menunjukkan hal yang sama, yaitu termasuk katagori ketidakmerataan rendah.

Tampak pula bahwa persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah relatif konstan untuk kurun waktu 1984-1994, yaitu antara 21 sampai 26 persen. Demikian pula untuk Indeks Gini yang besarnya antara 0,250 dan 0,310. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi merata pada seluruh lapisan penduduk.

Tabel 6.2. Perkiraan Persentase Pembagian Pendapatan per Kapita dan Indeks Gini \*)  
1984 - 1994

Jenis Ukuran	1984	1987	1990	1993	1994
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. DISTRIBUSI PEMBAGIAN PENDAPATAN/BANK DUNIA					
40 persen rendah	21,28	24,24	21,94	25,66	25,08
40 persen sedang	38,99	36,25	38,70	37,58	37,98
20 persen tinggi	39,73	39,51	39,36	36,76	36,94
2. INDEKS GINI	0,309	0,283	0,296	0,254	0,259

Keterangan : \*) Dihitung/didekati dengan pengeluaran per kapita

**BAB VII**  
**PRODUKSI PANGAN**

Pembangunan di bidang pangan yang tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan menuju swasembada pangan, dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman pangan, yaitu padi dan palawija.

Lahan pertanian tanaman pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini luasnya sangat terbatas dan sulit ditingkatkan baik produktivitasnya maupun ekstensifikasinya. Walaupun begitu dengan program pembangunan yang terus dilaksanakan maka produksi pangan di daerah ini dapat terus ditingkatkan.

**7.1. Luas Panen Tanaman Pangan.**

Tabel 7.1. Luas Panen Tanaman Pangan  
1990-1995 (Hektar)

No	Jenis Tanaman	1990	1991	1992	1993	1994	1995 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Padi	132 861	141 578	144 586	143 578	158 034	159 823
	- Padi Sawah	68 042	79 797	80 113	84 981	84 782	93 029
	- Padi Ladang	64 819	61 781	64 473	58 597	73 280	66 794
2.	Jagung	213 893	232 965	212 211	206 058	241 965	254 176
3.	Ubi Kayu	84 997	79 929	87 994	68 677	81 655	81 561
4.	Ubi Jalar	12 059	13 692	11 652	11 893	12 188	11 955
5.	Kacang Tanah	9 194	10 282	9 755	7 424	7 937	10 543
6.	Kacang Kedelai	2 912	4 682	5 472	3 264	4 952	5 627

Keterangan : \*) Angka sementara.

Luas panen padi, baik padi sawah maupun padi ladang, dari tahun ke tahun terus bertambah luas, dari 132 861 ha pada tahun 1990 menjadi 159 823 ha pada tahun 1995. Dengan demikian selama lima tahun, ekstensifikasi tanaman padi telah dilakukan seluas 26 962 ha.

Jagung yang merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat daerah ini cukup luas lahan tanamannya, yaitu sekitar 254 ribu ha. Ekstensifikasi tanaman jagung cukup banyak dilakukan, selama lima tahun terakhir yaitu berhasil memperluas areal tanaman jagung seluas sekitar 40 283 ha, dan sekarang perluasan tanaman jagung masih tetap dilakukan melalui program HTI.

Ubi kayu juga merupakan salah satu jenis bahan makanan penting yang dapat menopang kebutuhan persediaan makanan. Produksi ubi kayu ini cukup berlimpah, sehingga setiap kali terjadi surplus.

Tanaman palawija lainnya seperti kacang kedelai perluasan arealnya cukup besar selama lima tahun terakhir yaitu dari 2 912 ha tahun 1990 menjadi 5 627 ha pada tahun 1995, sebaliknya untuk tanaman ubi jalar dan kacang tanah, walaupun banyak diusahakan namun belum secara baik ekstensifikasinya.

## 7.2. Rata-rata Produksi per Hektar.



Tabel 7.2. Rata-Rata Produksi Pangan Per Ha  
1990-1995 (Kwintal)

No Jenis Tanaman	1990	1991	1992	1993	1994	1995 <sup>*</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Padi	24,88	25,90	25,78	26,60	25,99	26,27
- Padi Sawah	30,98	31,07	31,14	31,40	31,47	31,67
- Padi Ladang	18,49	19,22	19,13	21,11	19,66	18,76
2. Jagung	16,69	17,24	17,75	17,78	17,50	16,38
3. Ubi Kayu	100,15	103,00	96,00	102,00	90,80	101,79
4. Ubi Jalar	76,03	80,00	78,00	70,00	71,27	78,06
5. Kacang Tanah	8,30	8,98	8,13	8,46	8,72	8,48
6. Kacang Kedelai	9,45	9,09	9,49	9,36	9,42	7,30

Keterangan : \*) Angka sementara.

Program intensifikasi tanaman padi, terutama padi sawah cukup berhasil dengan meningkatkan rata-rata produksi per hektar 30,98 kwintal pada tahun 1990 menjadi 31,67 kwintal pada tahun 1995.

Program intensifikasi jagung belum menunjukkan hasil yang cukup baik dengan menurunnya produktifitas per ha dari 16,69 kwintal tahun 1990 menjadi 16,38 kwintal pada tahun 1995

### 7.3. Produksi Pangan.

Dengan berhasilnya program ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman pangan, maka produksi pangan di Nusa Tenggara Timur terus meningkat, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 7.3 dibawah ini.

Tabel 7.3. Produksi Pangan di Nusa Tenggara Timur  
1990-1995 (Ton)

No	Jenis Tanaman	1990	1991	1992	1993	1994	1995*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Padi	330 590	366 637	372 806	381 915	410 757	4199299
	- Padi Sawah	210 772	247 916	249 475	266 804	266 717	294 629
	- Padi Ladang	119 818	118 721	123 331	115 111	144 040	125 300
2.	Jagung	356 962	401 620	376 569	366 347	423 416	416 362
3.	Ubi Kayu	851 248	943 290	840 787	698 873	741 443	830 240
4.	Ubi Jalar	91 686	109 585	91 219	82 659	86 868	93 315
5.	Kacang Tanah	7 635	9 229	7 928	6 284	6 918	8 938
6.	Kacang Kedelai	2 753	4 257	5 191	3 056	4 663	4 108

Keterangan : \*) Angka sementara.

Produksi padi dari tahun ke tahun terus meningkat, baik padi sawah maupun padi ladang, yaitu kalau pada tahun 1990 sebesar 330 590 ton maka terus meningkat menjadi 419 929 ton pada tahun 1995. Produksi jagung cenderung berfluktuasi, pada tahun 1990 sebesar 356 962 ton meningkat menjadi 401 620 ton pada tahun 1991 kemudian menurun menjadi 376 569 ton pada tahun 1992 dan akhirnya menjadi 416 362 ton pada tahun 1995. Produksi ubi kayu sangat melimpah walaupun produksinya juga fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun jika dilihat dari kebutuhan akan konsumsi ubi kayu maka masih terdapat kelebihan yang cukup besar.

Dengan demikian pengadaan pangan di daerah ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Memang produksi beras masih kurang, tidak cukup memenuhi kebutuhan penduduk di daerah ini, sehingga terpaksa harus memasukkan beras dari daerah/propinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi produksi jagung cukup dan malahan berlebihan. Produksi ubi kayu sangat berlimpah, sekitar 130 ribu ton dari jumlah produksi ubi kayu tidak termakan oleh penduduk, mungkin untuk makanan ternak dan terbuang. Ubi jalar masih merupakan bahan pendukung makanan di daerah ini, produksinya juga cukup banyak.

#### 7.4. Penyediaan Pangan.

Masalah pangan di daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut yang menyajikan data produksi/penyediaan dan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun 1995.

Tabel 7.4. Produksi dan Perkiraan Pangan  
Penduduk Nusa Tenggara Timur  
Tahun 1995

No	Jenis Makanan	Produksi (Ton)	Kebutuhan (Ton)		Kelebihan/ Kekurangan
			Konsumsi	Bibit & Makanan Ternak Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Beras	272 954	365 680	18 758	384 438 -111 484
2.	Jagung	416 362	246 193	107 725	353 913 + 62 444
3.	Ubi Kayu	830 240	266 726	251 894	518 620 +311 620
4.	Ubi Jalar	93 315	27 892	14 328	42 220 + 51 095
5.	Kacang Tanah	8 938	6 482	352	6 834 + 2 104
6.	Kacang Hijau	15 478	9 601	2 056	11 657 + 3 821
7.	Kacang Kedelai	4 108	38 159	711	38 870 - 34 762

Seharusnya masalah pangan di daerah ini bukan merupakan masalah yang serius apabila penduduk mau melakukan diversifikasi konsumsi pangan. Memang, beras untuk konsumsi penduduk Nusa Tenggara Timur terdapat kekurangan, yaitu sebanyak 111 484 ton. Namun produksi palawija terdapat surplus cukup besar. Produksi

Jagung terjadi surplus (kelebihan) sebesar 62 444 ton. Ubi kayu produksinya sangat tinggi, sehingga sebagian saja yang dikonsumsi oleh penduduk dan sebagian dipakai untuk makanan ternak, sehingga surplus cukup banyak yaitu sebesar 311 620 ton. Ubi jalar juga terdapat surplus sebesar 51 095 ton. Kacang tanah dan kacang hijau yang merupakan bahan makanan berprotein, masih kurang disukai oleh masyarakat di sini, sehingga masih terdapat surplus masing-masing sebanyak 2 104 ton dan 3 821 ton, sedangkan kedelai karena kenaikan konsumsi khususnya sebagai bahan baku tahu dan tempe mengakibatkan kekurangan supply sebanyak 34 762 ton.

Masalah pangan terjadi karena penduduk Nusa Tenggara Timur kurang mempertahankan penganekaragaman konsumsi bahan makanan. Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa dari tahun ke tahun rata-rata konsumsi per kapita untuk beras makin meningkat, sebaliknya konsumsi jagung menurun.

Kalau program penganekaragaman pangan dapat terlaksana, yakni dengan mensubstitusikan beras dengan jagung atau ubi kayu, maka masalah pangan untuk propinsi ini dapat teratasi.

Konsumsi per kapita penduduk Nusa Tenggara Timur untuk bahan makanan 1993 sebagai berikut :

Bahan Makanan	Konsumsi per kapita per tahun (Kg)
(1)	(2)
1. Beras	104,36
2. Jagung	70,26
3. Ubi Kayu	76,12
4. Ubi Jalar	7,96
5. Kacang Tanah	1,85
6. Kacang Hijau	2,74
7. Kacang Kedelai	10,89

Tabel 7.5. Produksi Pangan per Kabupaten \*)  
Tahun 1995

No	Kabupaten	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kacang Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Sumba Barat	57 504	31 875	106 078	5 288	211	1 204	290
2.	Sumba Timur	28 933	19 795	23 052	1 705	655	501	261
3.	Kupang	51 445	37 439	27 815	5 416	1 602	1 766	99
4.	Timor Tengah Selatan	4 701	88 415	176 368	12 114	222	815	131
5.	Timor Tengah Utara	12 051	19 445	61 545	3 583	573	448	74
6.	B e l u	8 407	54 573	67 665	5 958	822	6 233	45
7.	A l o r	11 857	20 378	39 564	2 859	54	131	221
8.	Flores Timur	15 985	34 590	60 350	3 680	2 224	1 139	74
9.	S i k k a	15 857	39 327	58 866	7 853	949	328	12
10.	E n d e	29 695	20 541	75 214	2 678	290	223	146
11.	N g a d a	38 627	17 352	46 964	6 357	486	268	1 636
12.	Manggarai	144 848	32 632	86 759	35 824	850	2 422	1 119
	N T T	419 929	416 362	830 240	93 315	8 938	15 478	4 108

Keterangan : \*) Angka sementara

**BAB VIII**  
**SENSUS PERTANIAN 1993 (ST'93)**

Hasil Sensus Pertanian 1993 (ST'93) memberikan gambaran tentang rumahtangga pertanian yang berusaha di sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perunggasan, perikanan serta kehutanan.

Dari hasil Sensus Pertanian tersebut, tercatat sebanyak 550 837 rumahtangga yang melakukan kegiatan usaha pertanian. Dari jumlah tersebut terdapat 544 787 rumahtangga atau 96,56 persen adalah rumahtangga pertanian pengguna lahan. Bila dilihat menurut kegiatan/jenis usaha/sub sektor dari rumahtangga pengguna lahan maka rumahtangga dengan skala usaha padi dan palawija paling banyak digeluti oleh rumahtangga pertanian yaitu sebanyak 526 072 rumahtangga atau 96,56 persen, diikuti usaha peternakan dan perunggasan sebanyak 248 601 rumahtangga, mengusahakan tanaman perkebunan 243 161 rumahtangga dan yang mengusahakan tanaman hortikultura sebanyak 200 340 rumahtangga. Sedangkan yang paling sedikit diusahakan oleh rumahtangga pengguna lahan adalah usaha kolam air tawar dan tambak air payau masing-masing hanya 2 995 dan 111 rumahtangga. Dengan demikian usaha tanaman pangan (padi dan palawija) masih merupakan gantungan hidup yang penting bagi kebanyakan rumahtangga pertanian pengguna lahan di daerah ini.

Tabel 8. Banyaknya Rumahtangga Tani Pengguna  
Lahan Menurut Sub Sektor Hasil  
Sensus Pertanian 1983 dan 1993

Kegiatan rumahtangga	1983	1993	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	456 823	550 837	20,58
2. Pertanian pengguna lahan	448 803	544 787	21,39
3. Padi/palawija	441 731	526 072	19,09
4. Hortikultura	296 883	200 340	-32,52
5. Perkebunan	367 658	243 161	-33,86
6. Peternakan/perunggasan	187 384	248 601	32,67
7. Kolam air tawar	2 206	2 995	35,77
8. Tambak air payau	64	111	73,44

Dari tabel di atas nampak bahwa selama satu dasawarsa (1983-1993) terjadi penurunan rumahtangga pada usaha hortikultura dan perkebunan masing-masing 32,52 dan 33,86 persen. Sedangkan rumahtangga usaha tambak air payau nampaknya mulai diminati oleh rumahtangga sebagai usaha yaitu dari 64 rumahtangga pada tahun 1983 menjadi 111 pada tahun 1993. Untuk rumahtangga usaha perikanan kolam air tawar dan peternakan/perunggasan juga menunjukkan kenaikan relatif besar masing-masing 35,77 persen dan 32,67 persen pada periode yang sama.

Masih perlu penelitian apakah penurunan jumlah rumahtangga hortikultura dan rumahtangga perkebunan tersebut di atas disebabkan karena ada pergeseran kegiatan usaha ke sub sektor lain di dalam sektor pertanian itu sendiri. Atau ke sektor lain di luar sektor pertanian karena keterbatasan tersedianya lahan yang subur maupun sebab-sebab lain yang berkaitan dengan pemasaran hasil, distribusi dan teknologi produksi.

<https://ntt.bps.go.id>

**BAB IX**  
**HASIL STUDI IDENTIFIKASI DESA MISKIN**

Desa dan kelurahan yang terdapat di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1990 adalah 1 724 desa/kelurahan, termasuk satu desa persiapan di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Pada desa/kelurahan tersebut bermukim penduduk sebanyak 3 267 919 orang.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumlah desa/kelurahan miskin di Nusa Tenggara Timur sebanyak 683 desa/kelurahan atau 39,6 persen dari seluruh desa di Nusa Tenggara Timur. Pada desa miskin ini bermukim penduduk sebanyak 1 037 676 jiwa pada tahun 1990. Sementara perkiraan berdasarkan Susenas 1990, jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 790 350 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk yang tinggal di desa miskin termasuk kategori penduduk miskin. Sebaliknya ada penduduk yang termasuk katagori miskin berdiam di desa tidak miskin.

Jumlah desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1993 sebanyak 1 743 desa/kelurahan. Jumlah ini didasarkan kepada jumlah desa tahun 1990 ditambah dengan pembentukan 19 desa baru pada kecamatan baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 dan 46 Tahun 1992. Pemutakhiran desa miskin dilakukan hanya pada 1 734 desa/kelurahan, karena 9 desa lainnya dari segi teknis operasional belum berjalan.

Setelah dilakukan pemutakhiran desa miskin pada tahun 1993, jumlah desa/kelurahan miskin di Nusa Tenggara Timur sebanyak 468 desa/kelurahan atau 26,99 persen dari seluruh desa di Nusa Tenggara Timur.

Jumlah desa/kelurahan miskin/tidak miskin per kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 9. Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kotamadya dan Satus Desa

Kabupaten	S t a t u s    D e s a				
	Miskin	%	Tidak Miskin	%	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.Sumba Barat	44	35,20	81	64,80	125
02.Sumba Timur	9	9,00	91	91,00	100
03.K u p a n g	97	35,27	178	64,73	275
04.Timor T.Selatan	49	29,52	117	70,48	166
05.Timor T. Utara	17	15,04	96	84,96	113
06.B e l u	18	21,95	64	78,05	82
07.A l o r	15	26,79	41	73,21	56
08.Flores Timur	86	36,91	147	63,09	233
09.S i k k a	29	32,22	61	67,78	90
10.E n d e	25	24,27	78	75,73	103
11.N g a d a	20	14,71	116	85,29	136
12.Manggarai	59	23,14	196	76,86	255
Nusa Tenggara Timur	468	26,99	1 266	73,01	1 734

Sejak tahun 1994 semua desa miskin tersebut diberikan bantuan INPRES yang dikenal dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 20 juta per desa per tahun untuk selama tiga tahun. Kecuali desa miskin yang penduduknya kurang dari 50 rumahtangga hanya untuk satu tahun dan yang kurang dari 100 rumahtangga hanya untuk dua tahun.

Atas dasar pemutakhiran data potensi desa pada tahun 1994, maka diperoleh tambahan desa yang memperoleh Program IDT untuk tahun 1995 sebanyak 42 desa, sehingga jumlah desa yang mendapat bantuan Program IDT untuk tahun 1995/1996 di Propinsi Nusa Tenggara Timur ada sebanyak 508 desa, karena 2 desa dari 468 desa yang memperoleh bantuan Program IDT tahun 1994/1995 mempunyai penduduk kurang dari 50 rumahtangga.

BPS PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KUSA TENGGARA TIMUR

<https://ntt.bps.go.id>

**BPS PERPUSTAKAAN**  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<https://ntt.bps.go.id>

**BPS**

**KANTOR STATISTIK PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111  
Telp. 21755, 33124 - Fax. 33124**